BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Tanah merupakan salah satu unsur terpenting dalam kehidupan dan kemajuan manusia, masyarakat dan suatu bangsa. Dari proses untuk mempertahankan hidup sampai diakhiri dengan kematian pun tanah tetap menjadi unsur terpenting dalam kehidupan dalam masyarakat. Tak dipungkiri lagi bahwa tanah merupakan sumber kehidupan masyarakat. tak dipungkiri lagi bahwa tanah adalah sumber kehidupan untuk hidupnya manusia, masyarakat dan suatu bangsa Negara Indonesia merupakan Negara agraris, dimana penduduk bangsa Indonesia bermata pencaharian sebagai petani. Dalam bertani, sudah barang tentu tanah dijadikan sebagai media untuk bercocok tanam. Indonesia yang berada dalam garis khatulistiwa menjadikan tanah di wilayah Indonesia sangat subur untuk ditanami berbagai macam hasil tanam, mulai dari komoditi pertanian, perkebunan dan lain-lain, dan betapa pentingnya tanah itu di kehidupan masyarakat dan kesini tanah menjadi barang yang berharga maka terciptalah profesi yang berkaitan dengan kepemilikan tanah yaitu notaris

Notariat sudah dikenal di tanah air kita, semenjak Belanda menjajah Indonesia, karena notariat adalah suatu lembaga yang sudah di kenal dalam

kehidupan mereka di tanah airnya sendiri.¹ Keberadaan Lembaga Notaris di Indonesia senantiasa dikaitkan dengan keberadaan fakultas hukum, hal ini terbukti dari institusi yang menghasilkan Notaris semuanya dari fakultas hukum dengan kekhususan Program Pendidikan Spesialis Notaris atau sekarang ini Program studi Magister Kenotariatan.²

Notaris sebagai pejabat umum ikut dalam membangun kelancaran hukum di Indonesia, karena selain dampak notaris yang begitu besar, notaris dikenal kelompok terpadang di Indonesia. Notaris sebagai kelompok terpadang berarti notaris merupakan suatu komunitas keilmuan yang secara sosiologis, ekonomis, politis berada dalam stratifikasi yang lebih tinggi di antara masyarakat pada umumnya. Dasar utama dari suatu profesi notaris ini adalah kepercayaan dan sebagai suatu komunitas terpadang, para professional yang tergabung dalam komunitas tersebut menanggung amanah yang berat atas kepercayaan yang diembankan kepadanya. Nilai lebih dari suatu profesi adalah sejauh mana seorang professional mampu menahan godaan atas kepercayaan yang di embankan kepadanya padahal godaan untuk menyelewengkan kepercayaan begitu besar.

Notaris merupakan profesi yang terhormat dan selalu berkaitan dengan moral dan etika ketika menjalankan tugas jabatannya. Saat menjalankan tugas jabatannya, notaris/ppat berpegang teguh dan menjunjung tinggi martabat

¹ R. Soegono Notodisoerjo, *Hukum Notariat Di Indonesia Suatu Penjelasan*, Cetakan 2, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1993, hlm 1

² Habib Adjie, *Hukum Notaris Indonesia (tafsir tematik terhadap Undang-undang Jabatan Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris)*, cetakan 2, Bandung, PT. Refika Aditama, 2009, Hlm. 1.

profesinya sebagai jabatan yang terhormat. Karena lekatnya etika pada profesi notaris disebut sebagai profesi yang mulia (*officium nobile*).³

Pengertian Notaris, terdapat pada Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris yang menyatakan “Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini atau berdasarkan Undang-undang lainnya.

Akta otentik yang dibuat secara teoritis adalah surat atau akta yang sejak semula dengan sengaja berarti bahwa sejak awal dibuatnya surat itu tujuannya adalah untuk pembuktian dikemudian hari jika terjadi sengketa. Sedangkan dalam dogmatis yakni menurut pasal 1868 Kitab Undang-undang Hukum Perdata suatu akta otentik adalah akta yang bentuknya ditentukan oleh Undang-undang dan dibuat oleh atau dihadapan pegawai-pegawai (pejabat) umum yang berkuasa untuk itu ditempat akta tersebut dibuatnya.⁴

Kepastian hukum itu diwujudkan oleh hukum dengan sifatnya yang hanya membuat suatu aturan hukum yang bersifat umum, sifat umum dari aturan-aturan hukum membuktikan bahwa hukum tidak bertujuan untuk mewujudkan keadilan atau kemanfaatan, melainkan semata-mata untuk kepastian.⁵ Kepastian hukum merupakan jaminan mengenai hukum yang berisi keadilan. Norma-norma

³ Abdul Ghofur Anshori, *Lembaga Kenotariatan Indonesia*, (Yogyakarta : UII Press, 2009), hlm 6

⁴ Abdul Ghofur Anshori, *Lembaga Kenotariatan Indonesia Perspektif Hukum Dan Etika*, (Jakarta, UII Pres:2009) hal 18.

⁵ Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis*, (Jakarta,Toko Gunung Agung:2002) hal 82.

yang mengajukan keadilan harus sungguh-sungguh berfungsi sebagai peraturan yang ditaati. Keadilan dan kepastian hukum merupakan bagian-bagian yang tetap dari hukum. Keadilan dan kepastian hukum harus diperhatikan, kepastian hukum harus dijaga demi keamanan dan ketertiban suatu Negara.

Permasalahan pertanahan yang sering timbul merupakan salah satu akibat dari semakin meningkatnya pembangunan pada era saat ini. Salah satu faktor penyebabnya adalah perbedaan kepentingan masyarakat terutama dalam bidang pertanahan. Perbedaan kepentingan yang mengakibatkan sengketa di bidang pertanahan dalam masyarakat baik antar individu, individu dengan pemerintah akan terus berlanjut seiring dengan semakin meningkatnya kebutuhan akan tanah. Permasalahan pertanahan yang sering terjadi pada saat ini biasanya adalah menyangkut kepastian hukum hak atas tanah. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah Pasal 4 yaitu untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum kepada pemilik tanah, telah ditegaskan bahwa sertifikat merupakan alat bukti yang kuat, dan agar pemegang hak dengan mudah dapat membuktikan bahwa dirinya sebagai pemegang haknya. Sertifikat diterbitkan untuk kepentingan pemegang hak yang bersangkutan sesuai dengan data fisik dan data yuridis yang telah diatur dalam buku tanah.

Sejak berlakunya Peraturan Pemerintah tentang Pendaftaran Tanah, maka jual beli juga harus dilakukan para pihak di hadapan PPAT yang bertugas membuat akta. Dengan dilakukannya jual beli dihadapan PPAT, dipenuhi syarat terang (bukan perbuatan hukum yang gelap, yang dilakukan secara sembunyi-

sembunyi). Untuk dibuatkan akta jual beli tanah tersebut, pihak yang memindahkan hak, harus memenuhi syarat yaitu berwenang memindahkan hak tersebut, sedangkan pihak yang menerima harus memenuhi syarat subyek dari tanah yang akan dibelinya itu. Serta harus disaksikan oleh sekurang-kurangnya dua orang saksi.

Notaris merupakan jabatan kepercayaan. Hal ini mengandung makna, mereka yang menjalankan tugas jabatan dapat dipercaya dan karena jabatan Notaris sebagai jabatan kepercayaan, sehingga jabatan Notaris sebagai jabatan kepercayaan dan orang yang menjalankan tugas jabatan juga dapat dipercaya yang keduanya saling menunjang. Oleh karena itu, Notaris dalam menjalankan tugas jabatannya mempunyai kewajiban merahasiakan segala sesuatu mengenai akta sesuai dengan sumpah / janji jabatan, kecuali Undang-Undang menentukan lain (Pasal 16 ayat (1) huruf e Undang-Undang No. 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris).⁶

Perbuatan membuat surat palsu adalah perbuatan membuat sebuah surat yang sebelumnya tidak ada/belum ada, yang sebagian atau seluruh isinya palsu. Surat yang dihasilkan dari perbuatan ini disebut dengan surat palsu. Sementara perbuatan memalsukan, adalah segala wujud perbuatan apapun yang ditujukan

⁶ Habib Adjie, *Merajut Pemikiran Dalam Dunia Notaris dan PPAT* (Bandung, Citra Aditya Bakti, 2010) hlm.12.

pada sebuah surat yang sudah ada, dengan cara menghapus, mengubah atau mengganti salah satu isi surat sehingga berbeda dengan surat semula.⁷

Pemalsuan merupakan suatu bentuk kejahatan yang diatur dalam Bab XII Buku II KUHPidana, dimana pada buku tersebut dicantumkan bahwa yang termasuk pemalsuan hanyalah berupa tulisan-tulisan saja, termasuk didalamnya pemalsuan tanda tangan yang diatur dalam pasal 263 KUHPidana s/d Pasal 276 KUHPidana.

Tindak Pidana yang sering terjadi adalah berkaitan dengan Pasal 263 KUHPidana (membuat surat palsu atau memalsukan surat); dan Pasal 264 (memalsukan akta-akta otentik) dan pasal 266 KUHPidana (menyuruh memasukkan keterangan palsu ke dalam suatu akta otentik).

Contoh kasus yang ditemukan antara lain adalah Notaris DNE dituntut penjara karena terkait dugaan pemalsuan akta otentik dan penyerobotan lahan seluas 23 hektar di Pranti, Kecamatan Sedati, Kabupaten Sidoarjo.⁸ Dan Notaris MR di tuntutan 2(dua) tahun masa percobaan dalam pemalsuan akta di palu.⁹

Berdasarkan latar belakang permasalahan yang telah disebutkan diatas mengenai hak milik yang di palsukan oleh seorang oknum, penulis tertarik untuk menyusun tesis dengan judul “Analisis Yuridis Penerapan Sanksi Pidana

⁷ Adami Chazawi, *Kejahatan terhadap Pemalsuan*, (Jakarta, Pt. RajaGrafindo Persada:2005)hlm 11

⁸ <https://faktualnews.co/2019/10/04/kasus-dugaan-serobot-lahan-23-ha-di-sidoarjo-notaris-dyah-tetap-dibui-meski-berkursi-roda/167942/> Dikutip pada tanggal 6 November 2019, pada pukul 22.43 WIB.

⁹ <https://m.suarakarya.id/detail/78063/Kasus-Pemalsuan-Akte-Notaris-Ini-Hanya-Jalani-Hukuman-Percobaan> Dikutip pada tanggal 6 November 2019, pada pukul 22.43

Terhadap Notaris/Pejabat Pembuat Akta Tanah Dalam Tindak Pidana Pemalsuan Akta Otentik Di Pengadilan Negeri Semarang”

B. Rumusan Masalah

Permasalahan yang dapat dirumuskan dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimana penerapan sanksi pidana terhadap Notaris/PPAT yang melakukan tindak pidana pemalsuan akta pada Perkara di Pengadilan Negeri Semarang
2. Apa akibat hukum terhadap Notaris/PPAT yang dikenakan sanksi Pidana pemalsuan akta berikut aktanya yang dijadikan objek perkara di Pengadilan pada perkara di Pengadilan Negeri Semarang

C. Tujuan Penelitian

1. Mengetahui penerapan sanksi pidana terhadap Notaris/PPAT dalam tindak pidana pemalsuan Akta pada Perkara Di Pengadilan Negeri Semarang
2. Mengetahui Akibat hukum terhadap Notaris/PPAT yang dikenakan sanksi Pidana pemalsuan akta berikut aktanya yang dijadikan objek perkara dipengadilan pada perkara di Pengadilan Negeri Semarang

D. Kerangka Konseptual

a. Analisis yuridis

Dalam pengertian menurut kamus besar bahasa Indonesia, analisis/ana·li·sis/ n merupakan penyelidikan terhadap suatu peristiwa (karangan, perbuatan, dan sebagainya) untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya (sebab-musabab,

duduk perkaranya, dan sebagainya).¹⁰ Menurut Kamus Hukum, kata yuridis berasal dari kata Yuridisch yang berarti ,menurut hukum atau dari segi hukum.¹¹ Dapat disimpulkan analisis yuridis berarti penyelidikan terhadap suatu peristiwa untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya dari segi hukum.

b. Sanksi Pidana

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia sanksi/*sank·si*/ merupakan tanggungan (tindakan, hukuman, dan sebagainya) untuk memaksa orang menepati perjanjian atau menaati ketentuan 1022 Undang-Undang (anggaran dasar, perkumpulan dan sebagainya): dalam aturan tata tertib harus ditegaskan apa -- nya kalau ada anggota yang melanggar aturan-aturan itu.¹² pidana/*pi·da·na*/ n Huk kejahatan (tentang pembunuhan, perampokan, korupsi, dan sebagainya); kriminal: perkara -- , perkara kejahatan (criminal).¹³ Jadi kesimpulannya Sanksi pidana adalah penderitaan atau nestapa yang dibebankan kepada orang yang melakukan perbuatan yang memenuhi unsure-unsur syarat tertentu, sedangkan Roeslan Saleh menegaskan bahwa pidana dalah reaksi atas delik, dan berwujud nestapa yang dengan sengaja dilimpahkan Negara kepada pembuat delik.¹⁴

¹⁰ <https://kbbi.web.id/analisis> dikutip pada tanggal 22 Oktober 2019 pada pukul 09.45 WIB

¹¹ M. Marwan dan jimmy P., *Kamus Hukum*,(Surabaya, Reality Publisher:2009), Hal 651.

¹² <https://kbbi.web.id/sanksi> Diakses pada tanggal 6 November 2019 pada pukul 12.59 WIB

¹³ <https://kbbi.web.id/Pidana> Diakses pada tanggal 6 November 2019 pada pukul 12.59

¹⁴ Tri Andrisman, *Asas-Asas Dan Dasar Aturan Hukum Pidana Indonesia*,(Bandar Lampung, Ula, 2009), Hlm 8

a. Notaris

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah notaris/*no-ta-ris/ n* orang yang mendapat kuasa dari pemerintah (dalam hal ini Departemen Kehakiman) untuk mengesahkan dan menyaksikan berbagai surat perjanjian, surat wasiat, akta, dan sebagainya.¹⁵ Menurut pasal 1 angka (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris menyatakan bahwa Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan memiliki kewenangan lainnya. Jadi kesimpulannya sebuah sebutan profesi untuk seseorang yang telah mendapatkan pendidikan hukum yang dilisensi oleh pemerintah untuk melakukan hal-hal hukum, khususnya sebagai saksi penandatanganan pada dokumen.

b. Tindak Pidana Pemalsuan

Menurut Kitab Undang-undang Hukum Pidana tindak pidana pemalsuan dalam pasal 263 ayat (1) dan (2), ayat (1), Barang siapa yang membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan suatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau diperuntukan sebagai bukti dari pada suatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak palsu, dipidana jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian, karena pemalsuan surat dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun. Ayat (2), Diancam dengan pidana yang

¹⁵ <https://kbbi.web.id/notaris> Dikutip pada tanggal 22 Oktober 2019 pada pukul 09.50 WIB

sama, barang siapa dengan sengaja memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah asli, jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan beragam.

c. Akta Otentik

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, akta adalah surat tanda bukti berisi pernyataan (keterangan, pengakuan, keputusan, dan sebagainya) tentang peristiwa hukum yang dibuat menurut peraturan yang berlaku, disaksikan dan disahkan oleh pejabat resmi¹⁶, sedangkan otentik adalah asli¹⁷ jadi kesimpulannya akta yang dibuat oleh atau di hadapan pejabat umum yang berwenang membuat akta dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang dengan asli.

Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, akta otentik adalah suatu akta otentik ialah suatu akta yg dibuat dlm bentuk yg ditentukan UU oleh/dihadapan pejabat umum yg berwenang untuk itu di tempat akta itu dibuat.

E. Kerangka Teori

Untuk memberikan gambaran tentang permasalahan dalam objek penelitian, penulis menggunakan teori hukum yaitu Teori Kepastian hukum, dan Teori Keadilan.

a. Teori Kepastian Hukum

Kepastian adalah perihal (keadaan) yang pasti, ketentuan atau ketetapan. Hukum secara hakiki harus pasti dan adil. Pasti sebagai pedoman kelakuan dan

¹⁶ <https://kbbi.web.id/akta> dikutip pada tanggal 22 oktober 2019 pada pukul 09.53 WIB

¹⁷ <https://kbbi.web.id/otentik> dikutip pada tanggal 22 oktober 2019 pada pukul 09.53 WIB

adil karena pedoman kelakuan itu harus menunjang suatu tatanan yang dinilai wajar. Hanya karena bersifat adil dan dilaksanakan dengan pasti hukum dapat menjalankan fungsinya. Kepastian hukum merupakan pertanyaan yang hanya bisa dijawab secara normatif, bukan sosiologi.¹⁸

Menurut Kelsen, Hukum adalah sebuah system norma. Norma adalah pernyataan yang menekankan aspek “seharusnya” atau *das sollen*, dengan menyertakan beberapa peraturan tentang apa yang harus dilakukan. Norma-norma adalah produk dan aksi manusia yang deliberative. Undang-undang yang berisi aturan-aturan yang bersifat umum menjadi pedoman bagi individu bertingkah laku dalam masyarakat, baik dalam hubungan dengan sesama individu maupun dalam hubungannya dengan masyarakat. Aturan-aturan itu menjadi batasan bagi masyarakat dalam membebani atau melakukan tindakan terhadap individu. Adanya aturan itu dan pelaksanaan aturan tersebut menimbulkan kepastian hukum.¹⁹

b. Teori Keadilan

Keadilan adalah pemenuhan keinginan individu dalam suatu tingkat tertentu. Keadilan yang paling besar adalah pemenuhan keinginan sebanyak-banyaknya orang. Pemenuhan keadilan sehingga suatu keadaan layak disebut adil adalah sesuatu yang sulit. Hal tersebut tidak dapat dijawab berdasarkan

¹⁸ Dominikus Rato, *Filsafat Hukum Mencari: Memahami dan Memahami Hukum*, (Yogyakarta, Laksbanag Pressindo,) 2010, hlm.59

¹⁹ Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta, Kencana:2008), Hlm 158

pengetahuan rasional. Jawaban pertanyaan tersebut adalah suatu pembenaran nilai.²⁰

Keadilan pada dasarnya merupakan prinsip dari kebijakan rasional yang diaplikasikan untuk konsepsi jumlah dari kesejahteraan seluruh kelompok dalam masyarakat. Untuk mencapai keadilan tersebut, maka rasional jika seseorang memaksakan pemenuhan keinginannya sesuai dengan prinsip kegunaan, karena dilakukan untuk memperbesar keuntungan bersih dari kepuasan yang diperoleh oleh anggota masyarakatnya.²¹

F. Metode Penelitian

Penelitian merupakan suatu sarana pokok dalam pengembangan ilmu pengetahuan. Penelitian bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran secara sistematis, metodologi, dan konsisten.²² Penelitian merupakan sarana ilmiah bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, maka metodologi yang diterapkan senantiasa disesuaikan dengan ilmu pengetahuan yang menjadi induknya, sehingga metodologi yang dipergunakan tidak akan selalu sama, diselaraskan dengan ilmu pengetahuan yang akan diteliti.

Oleh karena penelitian merupakan suatu sarana (ilmiah) bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang nantinya akan sangat berguna

²⁰ Jimly Asshiddiqie, *Teori Hans Kelsen tentang Hukum*, (Jakarta, Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi:2006)Hlm. 18

²¹ Suteki dan Galang Taufani, *Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori dan Praktik)*, Depok, Rajawali Pers:2008) Hlm 98-102

²² Riduan Syahrani, *Rnagkuman Intisari Ilmu Hukum*, (Bandung, Citra Aditya Bakti, 1999), hlm.23

bagi kesejahteraan masyarakat dan kemajuan bangsa, maka metodologi penelitian yang diterapkan harus senantiasa disesuaikan dengan ilmu pengetahuan yang menjadi induknya.²³

Dengan demikian, dalam pelaksanaan penelitian hukum dan untuk menyusun penulisan hukum ini perlu didukung oleh metodologi yang baik agar diperoleh hasil yang dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Inti daripada metodologi dalam setiap penelitian hukum adalah menguraikan tentang tata cara bagaimana suatu penelitian hukum itu harus dilakukan. Sebagai uraian tentang tata cara (teknik) penelitian yang harus dilakukan, maka metodologi penelitian yang harus dilakukan, maka metodologi penelitian hukum pada pokoknya mencakup uraian-uraian mengenai :

1. Metode Pendekatan

Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris yang dengan kata lain adalah jenis penelitian hukum sosiologis dan dapat disebut pula dengan penelitian lapangan, yaitu mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataannya di masyarakat.²⁴ atau dengan kata lain yaitu suatu penelitian yang dilakukan terhadap keadaan sebenarnya atau keadaan nyata yang terjadi di masyarakat dengan maksud untuk mengetahui dan menemukan fakta-fakta dan data yang dibutuhkan, setelah data yang

²³ Soerjono Soekanto dan Sri Mahmudji, *Penelitian Hukum Normatif*, (Jakarta, CV Rajawali, 1984), Hlm 1

²⁴ Suharsimi Arikunto. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek* (Jakarta, Rineka Cipta, 2002), hal 126

dibutuhkan terkumpul kemudian menuju kepada identifikasi masalah yang pada akhirnya menuju pada penyelesaian masalah.²⁵

Penelitian ini termasuk kedalam penelitian Empiris, karena hendak mengetahui bentuk Akibat hukum terhadap pemalsuan akta yang dilakukan notaris dengan studi kasus di Pengadilan Negeri Semarang

Metode pendekatan diatas juga ditegaskan dengan kajian terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu berkaitan dengan hukum pidana, kode etik notaris, kode etik PPAT, peralihan hak milik atas tanah

2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi yang digunakan dalam penelitian ini bersifat deskriptif analis, yaitu dimaksudkan untuk memberi data yang seteliti mungkin tentang suatu keadaan atau gejala-gejala lainnya. Karena penelitian ini diharapkan memberi gambaran secara rinci, sistematis dan menyeluruh mengenai peraturan perundang-undangan yang berlaku dikaitkan dengan teori-teori hukum dan praktek pelaksanaan hukum positif. Disamping itu bertujuan memberikan gambaran dan menganalisis permasalahan yang ada, di mana penelitian ini akan memaparkan segala hal yang berhubungan dengan rekonstruksi perlindungan hukum Notaris sebagai saksi dalam jabatan Notaris yang berbasis nilai keadilan.

3. Sumber Data

²⁵ Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, (Jakarta, Sinar Grafika, 2002), hal 15

Pada bagian ini peneliti mendapatkan data yang akurat dan otentik karena dilakukan dengan mengumpulkan sumber data baik primer dan sekunder, yang disesuaikan dengan pendekatan penelitian. data primer dan data sekunder yang digunakan adalah:

Data sekunder adalah data yang telah dikumpulkan dan disistematisir oleh pihak lain, dan digunakan juga dalam penelitian ini.²⁶

Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini berupa :

- 1) Bahan hukum Sekunder yang berupa ketentuan perundang-undangan, antara lain :
 - Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945
 - Kitab Undang-undang Hukum Perdata
 - Undang-undang Nomor 2 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang jabatan notaris.
 - Peraturan Mneteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.02.pr.08.10 Tahun 2004 tentang Tata cara pengangkatan anggota, pemberhentian Anggota, Susunan Organisasi, Tata Kerja dan Tata cara Pemeriksaan Majelis Pengawas;
 - Peraturan pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang pendaftaran Tanah;

²⁶ David W Stewart, *Seconddary Research Information, Sources and Methods*, London, Sage Publication

- Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2006 tentang peraturan Jabatn Pejabat Pembuat Akta Tanah tentang Perubahan atas peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah;
 - Putusan Perkara pengadilan Negeri Semarang
- 2) Bahan Hukum Primer berupa tulisan-tulisan para ahli di bidang hukum dan bidang-bidang yang terkait dengan permasalahan yang diteliti.
 - 3) Bahan Hukum Tersier meliputi kamus hukum.
4. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian yang dilakukan dengan cara mengamati langsung terhadap para pihak yang berkompeten melalui Wawancara /interview untuk memperoleh informasi dengan bertanya langsung pada yang diwawancarai. Interview yang digunakan dalam penelitan ini adalah interview bebas terpimpin, yaitu dengan mempersiapkan terlebih dahulu pertanyaan-pertanyaan sebagai pedoman, tetapi tidak menutup kemungkinan adanya variasi pertanyaan sesuai dengan situasi ketika wawancara berlangsung.

Wawancara adalah situasi peran antara pribadi bertatap muka, ketika seseorang yakni pewawancara, mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang dirancang untuk memperoleh jawaban yang relevan dengan masalah penelitan kepada responden.

Wawancara langsung dalam pengumpulan fakta social sebagai bahan kajian ilmu hukum empiris, dilakukan dengan cara Tanya jawab secara langsung dimana semua pertanyaan disusun dengan isu hukum, yang diangkat dalam penelitian. Wawancara langsung ini dimaksudkan untuk memperoleh informasi yang benar dan akurat dari sumber yang ditetapkan sebelumnya. Wawancara tersebut semua keterangan yang diperoleh mengenai apa yang diinginkan dicatat atau direkam dengan baik. Wawancara dilakukan untuk memperoleh keterangan secara lisan guna mencapai tujuan yaitu mendapat informasi yang akurat dari narasumber yang berkompeten. Yaitu Hakim Pada Pengadilan Negeri Semarang terkait perkara pemalsuan akta yang dilakukan notaris, serta pihak-pihak yang memiliki kompetensi yang berkaitan dengan penulisan ini.

Dalam teknik pengumpulan data ini menggunakan penelitian lapangan dan studi kepustakaan. Dalam penelitian ini, akan diteliti data sekunder. Dengan demikian ada dua kegiatan utama yang dilakukan dalam melaksanakan penelitian ini, yaitu studi kepustakaan (library research), yang diperoleh melalui kepustakaan, dengan mengkaji, menelaah dan mengolah literature, peraturan perundang-undangan, artikel-artikel atau tulisan yang berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti dan wawancara, yakni dengan mengajukan pertanyaan kepada narasumber secara bebas.

5. Metode Analisis Data

Dalam melakukan analisisnya, akan digunakan cara deskriptif analitik, sehingga tidak hanya melakukan eksplorasi dan klasifikasi atas fenomena atau kenyataan-kenyataan social melainkan juga mencari hubungan kausalitas dan interaksional dari semua data terpilih yang berhasil dikumpulkan.²⁷

Data yang telah di kumpulkan baik dari penelitian lapangan maupun penelitian kepustakaan akan dianalisis dengan metode analisis data kualitatif yaitu:

- Analisis Deskriptif :

Metode analisis dengan memilih data yang menggambarkan keadaan yang sebenarnya di lapangan, analisis menggunakan cara berpikir induktif, yaitu menyimpulkan hasil penelitian dari hal-hal yang sifatnya khusus ke hal-hal yang sifatnya umum.

- Analisis kualitatif :

Metode analisis data yang mengelompokkan dan menyeleksi data yang diperoleh dari penelitian lapangan menurut kualitas dan kebenarannya, kemudian dihubungkan dengan teori-teori yang diperoleh dari studi kepustakaan sehingga diperoleh gambaran dan pemahaman yang sistematis dan menyeluruh untuk menjawab yang diteliti.

G. Sistematika Penulisan

Untuk menyusun tesis ini penulis membahas dan menguraikan masalah, yang dibagi dalam empat bab. Adapun maksud dari pembagian tesis ini ke dalam bab-

²⁷ Sanapiah Faisal, *Format-Format Penelitian Sosial*, (Jakarta, Rajawali Pers:1995), hlm 25

bab dan sub bab adalah agar untuk menjelaskan dan menguraikan setiap permasalahan dengan baik dan mudah dipahami.

Bab I Pendahuluan tentang pendahuluan yang berisi latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka pemikiran, metode penelitian dan sistematika penulisan tesis.

Bab II Tinjauan pustaka tentang Tinjauan Umum tentang Notaris meliputi Pengertian Notaris, tugas dan wewenang Notaris, Tinjauan Umum tentang Pejabat Pembuat Akta Tanah meliputi Pengertian Pejabat Pembuat Akta Tanah, Tugas dan wewenang Pejabat Pembuat Akta Tanah, Tinjauan Umum tentang Tindak Pidana Pemalsuan Akta Otentik meliputi Pengertian tindak pidana, pengertian Pertanggungjawaban Pidana, Pengertian tindak pidana pemalsuan, pengertian Akta Otentik dan Ketentuan Tindak Pidana Pemalsuan Akta Otentik.

Bab III Hasil Penelitian dan Pembahasan tentang uraian hasil penelitian dan pembahasan yang menguraikan secara rinci mengenai penelitian dan hasil-hasilnya yang relevan dengan permasalahan yaitu penerapan hukum pidana terhadap notaris/PPAT dalam tindak pidana pemalsuan akta, dan akibat hukum terhadap notaris /ppat yang dikenakan sanksi pidana pemalsuan akta otentik berikut aktanya yang dijadikan objek perkara di pengadilan negeri semarang.

Bab IV Penutup tentang Bagian akhir yang berisikan tentang simpulan yang merupakan jawaban umum dari permasalahan yang ditarik dari hasil penelitian, selain itu dalam bab ini berisi saran yang diharapkan berguna bagi pihak terkait.